

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Program UEP-KM (Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin) di Kecamatan Way Halim**

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 yang menyebutkan Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama guna meningkatkan kualitas anggota dan kesejahteraan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan serta hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan bapak Santoso ada beberapa proses pelaksanaan pemberdayaan melalui program UEP-KM yaitu:

Proses pelaksanaan yang dilakukan untuk mendapat bantuan dana UEP-KM di Kecamatan Way Halim yaitu informasi dari Dinas Sosial yang diterima masyarakat selanjutnya diadakan perkumpulan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapat bantuan dana UEP-KM setelah mendapat penjelasan dari Dinas Sosial kemudian masyarakat yang berminat mendapat bantuan

mengikuti kegiatan pelatihan di Dinas Sosial. Kemudian pembentukan kelompok UEP-KM di Kecamatan Way Halim, karna banyaknya masyarakat yang berminat mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga saat ini sudah terbentuk 6 kelompok di kecamatan Way Halim.

Setelah itu tiap kelompok mengikuti pelatihan yang diberikan Dinas Sosial yang di sesuaikan potensi yang dimiliki masyarakat, pelatihan ini diadakan untuk memberikan keterampilan kepada tiap-tiap anggota yang belum mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki. Masing-masing kelompok membuat proposal yang akan di ajukan ke Dinas Sosial, dengan persyaratan keterangan surat tidak mampu dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Way Halim, untuk menerima bantuan tiap kelompok membuka rekening atas nama kelompok masing-masing baru setelah itu diadakan pencairan dana dari Dinas Sosial ke rekening kelompok masing-masing untuk membeli bahan modal atau alat-alat yang akan di gunakan untuk menjalankan program UEP-KM tersebut atau menyalurkan dana simpan pinjam kepada tiap anggota kelompok. Adapun status dana dan mekanisme pengelolaannya

## **1. Status dan Mekanisme Pengelolaan Dana**

### **a. Status Dana**

Dana program UEP-KM (Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin) bagi pembangunan perempuan di pedesaan bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi. Dana ini kemudian dikelola oleh tim

penggerak PKK desa/kelurahan yang di gulirkan kepada kelompok-kelompok UEP-KM di desa/kelurahan yang yang bersangkutan. Untuk satu Tahun dana disalurkan ke masing-masing kelompok sesuai dengan usulan yang diajukan oleh TP PKK desa/kelurahan melalui Kantor/badan/Dinas PMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang sudah disahkan dengan surat keputusan Gubernur Lampung. Selanjutnya pada tahun berikut tetap dikelola oleh TP PKK desa/kelurahan dan digulirkan kepada kelompok lain di dalam desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 10.000.000-30.000.000 per kelompok UEP-KM desa/kelurahan. Kemudian besarnya jasa pinjaman yang dibebankan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan kelompok UEP-KM desa/kelurahan yang digunakan untuk biaya operasional pengelola dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing ketua kelompok UEP-KM di Kecamatan Jagabaya, dalam penyaluran dana yang diberikan kepada anggota kelompok dalam program UEP-KM, penulis dapat menyimpulkan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada kelompok UEP-KM diberikan sebesar 30.0000.0000 perkelompok yang mana jumlah anggota kelompok yang masing-masingnya berjumlah 30 orang. Dana tersebut telah mengikuti prosedur pelaksanaan program pemberdayaan melalui UEP-

KM sehingga dana yang disalurkan dapat di gunakan sesuai dengan program yang di berikan oleh Dinas Sosial kota Bandar lampung.

**b. Mekanisme Pencairan Dana**

- 1) Ketua tim penggerak PKK Kabupaten/Kota agar membuka rekening di salah satu unit BRI terdekat dengan specimen tanda tangan oleh ketua TP PKK Kabupaten/Kota
- 2) Pemerintah Provinsi Lampung, melalui kas daerah mentransfer dana bantuan ke rekening Ketua Tim penggerak PKK kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan mekanisme pencairan dana dan wawancara dengan ibu Suparti selaku ketua kelompok UEP-KM, diatas penulis dapat menganalisi bahwa setiap ketua kelompok dan bendahara membuka rekening di bank Lampung dengan adanya specimen tanda tangan oleh ketua kelompok dan bendahara kemudian melalui kas daerah Dinas Sosial kota Bandar Lampung mentrasfer dan bantuan kerekening masing-masing kelompok.

**c. Mekanisme Penyaluran Dana**

Setelah diterima melalui rekening dan dicairkan oleh ketua PKK Kabupaten/Kota, maka dana tersebut langsung disalurkan kepada ketua kelompok-kelompok UEP-KM penerimaan bantuan dari Desa, Kelurahan yang tercantum dalam SK Gubernur Lampung dengan mempergunakan format yang sudah disediakan.

Penulis dapat simpulkan bahwa setelah dana di terima oleh ketua kelompok UEP-KM melalui rekening dana di cairkan. Dana tersebut dapat dikelola bersama dengan kegiatan sulam menyulam yang diajarkan melalui pelatihan Dinas Sosial atau simpan pinjam untuk masing-masing anggota untuk mengembangkan usaha masing-masing anggota.

Adapaun nama-nama kelompok UEP-KM yang terdapat di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dapat kita lihat pada tabel berikut:

Table. 20  
Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Penguatan Modal Usaha Dan Jenis Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Uep-Km Kecamatan Way Halim.

No	Desa/ kelurahan	Nama kelompok	Jumlah Anggota	Jenis usaha
1	Jagabaya I	Tedos Hati nusa indah	30 30	Simpan pinjam Simpan pinjam
2	Jagabaya II	Sapa Neduh Melati	30 30	Sulam bubut Simpan pinjam
3	Jagabaya III	Mawar	30	Kerajinan tangan mote-mote
4	Gunung Sulah	Kemang	30	Simpan pinjam
5	Way Halim Permai	-	-	-
6	Perumnas Way Halim	-	-	-

Sumber : profil Dinas Sosial bidang pemberdayaan

Dari tabel di atas dapat kita ketahui jumlah kelompok UEP-KM di Kecamatan Way Halim. Dan dari kelompok masyarakat penerima bantuan tersebut, dapat diketahui pula bahwa jumlah kelompok UEP-KM terbanyak adalah Desa Jagabaya I dan desa Jagabaya II. Dan juga dapat diketahui bahwa jenis usaha yang paling banyak adalah simpan pinjam. Ini

dikarenakan kebanyakan dari anggota kelompok UEP-KM ingin membuka usaha sendiri, dan mengelola usaha sendiri sesuai kemampuan anggota tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan program UEP-KM diatas maka ternyata terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Way Halim. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Table. 21

Jumlah Rumah Tangga Dan Rumah Tangga Miskin Tiap Desa Dan Kelurahan Yang Menerima Bantuan Program UEP-KM Di Kecamatan Way Halim Pada Tahun 2011-2015

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jagabaya I	411	206	260	212	120
2	Jagabaya II	167	130	131	102	84
3	Jagabaya III	112	58	45	63	51
4	GunungSulah	64	46	63	39	51
5	Way HalimPermai	69	54	49	40	32
6	Perumnas Way Halim	90	73	53	31	22
	Jumlah	913	567	601	487	360

Sumber: profil kecamatan Way Halim

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin yang menerima bantuan penguatan modal dalam program usaha peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Way Halim pada tahun 2011, dimana rumah tangga miskin terbanyak terdapat di Kelurahan Jagabaya I yaitu berjumlah 411 Rumah tangga miskin atau keluarga Miskin, dan total keluarga miskin yang ada di kecamatan Way Halim pada tahun 2011 adalah 913 keluarga miskin. Dan pada tahun 2013 jumlah keluarga miskin berkurang dengan berjalanya program pemberdayaan oleh Dinas Sosial yakni berjumlah 567 keluarga miskin. Kemudian pada tahun 2013 berjumlah 601,

bertambahnya jumlah keluarga miskin disbanding dengan tahun sebelumnya ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk pendatang, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan UEP-KM. Pada tahun 2014 berjumlah 487 keluarga miskin ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan melalui pemberdayaan, sedang pada tahun 2015 berjumlah 360 keluarga miskin menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UEP-KM oleh Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah kemiskinan di kecamatan Way Halim ini berhasil. Seperti yang dituturkan oleh ketua UEP-KM Desa Jagabaya I yakni Ibu Suparti ,

*“bahwa dengan adanya program bantuan UEP-KM ini cukup membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan, kemudian menurutnya UEP-KM ini sesuai dengan keadaan masyarakat desa. Dimana dalam masyarakat desa banyak terdapat ibu-ibu yang menganggur, karena tidak mempunyai keahlian dan modal. Akan tetapi dengan adanya program ini selain dananya mudah diperoleh juga sesuai dengan kondisi masyarakat desa.*

## **B. Dampak Program Pemberdayaan UEP-KM di Kecamatan Way Halim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk

menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Berdasarkan definisi pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kapasitas atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Teori tersebut sesuai dengan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program UEP-KM oleh Dinas Sosial bahwa setelah mendapat keterampilan dalam mengembangkan usaha melalui program pemberdayaan oleh Dinas Sosial, masyarakat yang mengikuti program UEP-KM telah memiliki keterampilan, peningkatan pengetahuan, kemandirian dalam berwirausaha, peningkatan kualitas



hidup, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan usaha kelompok, dan mengembangkan potensi anggota, yang mereka dapat dalam mengikuti pelatihan program pemberdayaan.

Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.

Dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, “community empowerment” (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada ininya adalah membantu klien” (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

pemberdayaan ekonomi diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh

pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam Islam kesejahteraan tidak diukur hanya dari aspek material, atau terpenuhinya kebutuhan jasmani seperti makanan dan tempat tinggal, namun ditekankan pada spiritual yakni ketenangan dan kenyamanan hati. Jika dalam berekonomi konvensional berbicara mengenai bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maka dalam ekonomi Islam mengarahkan bagaimana berekonomi agar kegiatan ekonomi tersebut memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. seperti firman Allah dalam QS. AL-Quraisy, (106): 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ  
خَوْفٍ ۚ

*Artinya : “(3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). (4). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”*

Dari ayat diatas terdapat tiga indikator kesejahteraan yakni menyembah Tuhan (Allah), menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Allah sangat menyukai orang-orang yang saling tolong-menolong

dalam kehidupannya. Dengan adanya pemberdayaan oleh Dinas Sosial yang dapat membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat sekitar Kecamatan Way Halim juga dapat memberikan dampak yang positif antar masyarakat tersebut. Karena dengan adanya pemberdayaan oleh Dinas Sosial ini dapat menciptakan hubungan kekerabatan dan silaturahmi yang lebih erat, dengan begitu pemberdayaan melalui UEP-KM oleh Dinas Sosial sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pandangan Islam. Karena dengan adanya hubungan kekerabatan dan silaturahmi yang baik akan menciptakan hati yang tenang dan damai sesuai dengan hakikat kesejahteraan dalam pandangan Islam.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang diperoleh dari hasil penelitian di daerah populasi yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Yang terdiri data primer dan data sekunder, data primer penulis dapatkan dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, dan wawancara dengan staff Dinas Sosial kota Bandar Lampung, dan data sekunder diperoleh dari profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil kuesioner yang di berikan kepada responden, bahwa pelatihan yang diberikan oleh tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman kepada anggota kelompok UEP-KM memberikan manfaat dalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat

mengaplikasika, sebagaimana telah diketahui bahwa sebelum mengikuti bimbingan dan pelatihan keterampilan, umumnya mereka kurang percaya diri dan diharapkan nantinya dapat berkiprah di lingkungan masyarakat masing-masing. Selain itu dengan adanya program pemberdayaan tersebut masyarakat merasakan semakin eratnya silaturahmi.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan kajian teori bahwa menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesejahteraan adalah aman sentosa, makmur, damai, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, damai. dari pengertian tersebut di pahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri ,dimaksud dalam ayat Al-Quran Al-anbiyya:21 yang telah dijelaskan di bab sebelumnya .

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak sodakoh. Dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi secara seimbang. Sedangkan suatu

keadaan terjagadan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dankehormatan manusia dengan demikian, kesejahteraan ekonomi Islam mencangkup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

Menurut umar chapra, hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan adalah sangat erat. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak terlepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). *Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan menurut pandangan islam.*

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun fisik-material dari individu masyarakat dalam Negara saja, teapi memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang merupakan juga elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia .begitulah Al-Qur'an secara sempurna mendefinisikan tentang kesejahteraan, dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman dan tentram.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator tersebut dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

a. Pendapatan

Table 22  
Jumlah pendapatan anggota UEP-KM  
Tahun 2011-2015

No	Kondisi	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sebelum adanya UEP- KM	Rp. 500.000	50	81%
		RP. 1.000.000-RP. 1.500.000	10	16%
		RP. 1.500.000- Rp. 2.000.000	2	3%
		Rp. 2.000.000- Rp. 3.000.000	0	0
	Jumlah		62	100%
2	Sesudah adanya UEP- KM	Rp. 500.000	5	8%
		RP. 1.000.000-RP. 1.500.000	45	73%
		RP. 1.500.000- Rp. 2.000.000	12	19%
		Rp. 2.000.000- Rp. 3.000.000	0	0
	Jumlah		62	100%

Sumber : data olahan kuesioner

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah reponden yang berpendapatan <Rp500.000 adalah 50 orang atau sama dengan 81%. Dan jumlah reponden yang berpendapatan Rp 1.000.000-RP. 1.500.000 adalah 10 orang atau sama dengan 16%. Kemudian jumlah responden yang berpendapatan Rp 1.500.000–2.000.000 adalah 2 orang atau sama dengan 3%. Sementara itu jumlah responden yang berpendapatan Rp 2.000.000–3.000.000 0 orang atau sama dengan 0%.

Dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan begitu memprihatikan. Bagaimana tidak, sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa sebanyak 10 orang reponden hanya berpenghasilanRp. 1.000.000-RP. 1.500.000, dan yang lebih memprihatinkan lagi sebanyak 50 orang responden hanya berpenghasilan <500.000. jumlah pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk

pangan, sandang, dan papan. Selain itu juga digunakan untuk pendidikan anak sekolah. Sementaradari data yang diperoleh sebanyak 51 orang responden memiliki tanggungan 3 – 5 orang. Sehingga jumlah pendapatan yang diterima nyaris tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan kesimpulannya masyarakat penerima bantuan belumlah hidup sejahtera. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang responden, yakni bu Ros

*“beliau menyakan bahwa sebelum memperoleh bantuan program UEP-KM sumber penghasilan keluarganya hanya bertumpu pada suaminya saja. Dengan penghaisilan berkisar Rp. 1.000.000–1.500.000 (tidak tetap) per bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya anak-anak sekolah sebanyak 5 orang, kebutuhan keluarga nyaris tidak mencukupi. Akan tetapi setelah memperoleh bantuan program UEP-KM bu Ros sekarang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya”.*

Dengan adanya program bantuan UEP-KM oleh Dinas Sosial ini diharapkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkat. Maka untuk mengetahui bagaimana dampaknya dapat kita lihat pada pembahasan berikut. Dan setelah dilakukannya pemberdayaan oleh Dias Sosial adanya pemberdayaan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendapatan <Rp500.000 adalah 5 orang atau sama dengan 8% dan jumlah reponden yang berpendapatan Rp. 1.000.000–1.500.000 adalah 45 orang atau sama dengan 73%%. Kemudian jumlah responden yang berpendapatan Rp 1.500.000–2.000.000 adalah 12 orang atau sama dengan 19%. Sementara itu jumlah responden yang berpendapatan Rp 2.000.000–3.000.000 adalah 0 orang atau sama dengan 0% dan jumlah responden. Dari data di atas

dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar jumlah pendapatan responden mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan, akan tetapi bila dilakukan secara terus-menerus akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan maka akses untuk memenuhi kebutuhan juga akan meningkat, maka dengan demikian kesejahteraan juga akan ikut meningkat. Dengan demikian berarti dengan adanya program bantuan UEP-KM (Usaha ekonomi produktif keluarga miskin) ini memberikan dampak baik terhadap masyarakat penerima bantuan.

#### b. Tingkat Kesehatan

Kesehatan akan dirasa ketika dimana kebutuhan seluruh Gizi telah terpenuhi. Seseorang akan merasa sehat akan dapat menjalankan aktifitas dengan nyaman dan produktif. Dengan keadaan yang sehat seseorang dapat menjalankan aktifitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Dengan meningkatnya pendapatan responden dapat memenuhi kebutuhan indikator kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dari hasil angket tabel 7 indikator Gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi dengan adanya pemberdayaan oleh Dinas Sosial yaitu 100% responden sudah memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemberdayaan oleh Dinas Sosial serta pemberian modal dapat memberikan dampak yang baik atau positif bagi kesejahteraan masyarakat termasuk anggota kelompok UEP-KM .



Kesadaran akan kesehatan ini juga telah dirasakan oleh masyarakat kecamatan Way Halim. Ibu Mila misalnya, yang biasanya terdapat anggota keluarga dalam keadaan sakit hanya dapat mengkonsumsi obat-obatan yang dibeli diwarung saja, kini dengan mengikuti kelompok UEP-KM beliau mendapatkan tambahan penghasilan yang mana apabila anggota keluarganya dalam keadaan sakit dapat dibawa kerumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Hal ini dibuktikan dari hasil angket yang mencapai 94,4 responden yang berobat secara medis ketika sakit dan dapat membayar penuh.

c. Perumahan

Dari penelitian didapatkan hasil bahwa responden yang memiliki rumah sendiri dengan adanya kelompok UEP-KM terdapat 43 orang atau 69%. Hal ini menandakan adanya peningkatan perekonomian yang berdampak positif pada kebutuhan perumahan pada tabel ke 16 kebutuhan akan atap rumah layak huni yakni atap genteng dengan adanya pemberdayaan mencapai 42 orang atau 68% sisanya asbes dan seng. Tabel 17 indikator lantai semen yakni sekitar 45 orang atau 73%. Dan ditandai juga dengan kepemilikan kamar mandi sendiri di rumah yakni pada table 19, terdapat 60 orang atau 98% responden yang sudah memiliki kamar mandi sendiri. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dengan adanya program pemberdayaan oleh Dinas Sosial.

#### d. Pendidikan

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang SIKNAS, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana mengajarkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional, regional/ provinsi dan kabupaten kota, insitutional/ sekolah maupun operasional (proses pembelajaran dalam guru).

Dari hasil sebaran angket data responden dengan lulusan SMA yang menempati setengah dari total jumlah responden yakni 32 orang atau sama dengan 52, lulus SMP 16 orang atau 26%, lulus SD 9 orang atau 16%, bersekolah namun tidak lulus SD 2 orang atau 3%, dan sisanya tidak mengenyai pendidikan atau tidak sekolah yaitu 1 orang atau 2%. Dari sini dapat diketahui bahwa, kurangnya biaya pendidikan masih tergolong tinggi membuat mereka sedikit sulit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang telah dijelaskan di atas menunjukan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan

UEP-KM oleh Dinas Sosial berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan, yakni dengan adanya pemberdayaan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan yang mana penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik berupa peningkatan dalam hal pangan serta kesehatan, namun juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut.